

LAPORAN

Evaluasi Benturan Kepentingan

Semester I
Tahun 2024



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Jl. Imam Bonjol No. 134 Semarang**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dapat menyelesaikan **Laporan Evaluasi Internal Penanganan Benturan Kepentingan Semester I Tahun 2024.**

Laporan ini disusun sesuai dengan amanat Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2020 Pasal 13 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Diharapkan hasil evaluasi ini dapat memacu penanganan benturan kepentingan ke arah birokrasi yang menuju tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Demikian laporan ini disusun dengan harapan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan sebagaimana mestinya.

Semarang, 29 Juli 2024

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



Ir. FENDIAWAN TISKIANTORO, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19650117 199010 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	1
C. Tujuan	2
D. Tindak Lanjut Evaluasi Internal Semester II Tahun 2023.....	2
BAB II IMPLEMENTASI PENANGANAN BENTURAN	
KEPENTINGAN	4
A. Sosialisasi	4
B. Identifikasi	4
C. Pencegahan	4
D. Penanganan Benturan Kepentingan.....	4
E. Pelaporan.....	5
BAB III EVALUASI PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN	
KEPENTINGAN	6
A. Sosialisasi	6
B. Identifikasi	6
C. Pencegahan	6
D. Penanganan Benturan Kepentingan.....	6
E. Pelaporan.....	7
BAB IV PENUTUP	8
A. Simpulan.....	8
B. Rencana Tindak Lanjut.....	8
LAMPIRAN	9
Lampiran 1 : Nota Dinas, Daftar Hadir, dan Notulen Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan Tahun 2024	9
Lampiran 2 : Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi memengaruhi atau dapat menyingkirkan profesionalitas seseorang dalam mengemban tugasnya. Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, keluarga, golongan, atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisinalitas keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara menjadi tidak efektif dan tidak efisien.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dalam proses pembangunan nasional sangat diperlukan adanya penyelenggara negara yang berwibawa, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, efektif dan efisien karena setiap pegawai mempunyai peranan yang menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain disyaratkan untuk memiliki profesionalisme, setiap pegawai juga harus mempunyai peranan yang menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, memiliki sikap mental yang jujur dan penuh rasa pengabdian kepada masyarakat, negara, dan bangsa serta harus mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah menyadari pentingnya pelaksanaan sikap yang tegas terhadap penanganan benturan kepentingan yang melibatkan pegawainya, meskipun dalam pelaksanaannya merupakan hal yang mana sulit dihindari. Hal ini penting untuk dibudayakan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu proses bagi pegawai yang mempunyai harkat, martabat dan citra yang tinggi dalam hubungan kerja dengan mitra dan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Nomor 523/5303/XI/2021 tanggal 08 November 2021 tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest*) Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum disusunnya laporan evaluasi internal penanganan benturan kepentingan ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 60);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 46);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 87);

C. Tujuan

Tujuan disusunnya laporan evaluasi internal penanganan benturan kepentingan ini antara lain:

1. Sebagai pedoman bagi pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah untuk mengenal, mencegah dan mengatasi situasi – situasi benturan kepentingan dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
2. Mengetahui terkait implementasi budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pegawai yang bersangkutan;
3. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara;
4. Menegakkan integritas;
5. Menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa;
6. Mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu dicegah terjadinya benturan kepentingan.

D. Tindak Lanjut Evaluasi Internal Semester II Tahun 2023

Berdasarkan Rencana Tindak Lanjut pada Laporan Evaluasi Internal Semester II

Tahun 2023 telah terlaksana kegiatan sosialisasi Upgrading dan Pembahasan Benturan Kepentingan Semester I Tahun 2024 pada tanggal 19 Juli 2024 yang diikuti secara luring oleh Sebagian pejabat Eselon III dan IV dan perwakilan masing-masing Bidang, UPT, CDK melalui daring. Selain itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah telah melakukan update identifikasi benturan kepentingan melalui Form Penanganan Benturan Kepentingan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024. Upaya Tim Penanganan Benturan Kepentingan dengan secara berkala dan terus menerus melaksanakan Tindakan preventif atas benturan kepentingan yang senantiasa bersinggungan, membuahkan hasil positif tidak adanya pelaporan mengenai benturan kepentingan.

BAB II

IMPLEMENTASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Implementasi benturan kepentingan yang sudah dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

A. Sosialisasi

Sosialisasi benturan kepentingan dilaksanakan secara *hybrid* yang dihadiri sebagian Eselon III dan IV secara luring dan perwakilan masing-masing bidang, CDK, dan UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah secara daring (**Lampiran 1**).

B. Identifikasi

Dalam rangka pengisian aplikasi SIBEKEN dan pemetaan potensi benturan kepentingan pada semester I tahun 2024, telah dilakukan identifikasi potensi benturan kepentingan yang dilakukan oleh Bidang, Cabang Dinas, dan UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. (**Lampiran 2**).

C. Pencegahan

Pencegahan yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam menghadapi potensi benturan kepentingan tertuang dalam form identifikasi potensi benturan kepentingan yang dibuat oleh Bidang, Cabang Dinas, dan UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (**Lampiran 2**).

D. Penanganan Benturan Kepentingan

Beberapa penanganan yang sudah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Melaksanakan seluruh upaya pencegahan potensi benturan kepentingan dan melakukan sosialisasi di setiap tahunnya sebagai Langkah preventif dalam menghadapi benturan kepentingan;
2. Menerapkan Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Nomor 523/5305/4/2022 tanggal 09 November 2021;
3. Mengefektifkan Tim Penanganan Benturan Kepentingan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Nomor 523/5303/XI/2021 tanggal 08 November 2021 tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest*) Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

E. Pelaporan

Pada semester I tahun 2024 tidak terdapat pelaporan mengenai benturan kepentingan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, yang ditunjukkan dalam matriks dibawah ini :

**Matriks Jumlah Pelaporan Benturan Kepentingan pada
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
Periode Januari – Juni Tahun 2024**

No.	Sekretariat/Bidang/UPT	Jumlah Benturan Kepentingan
1	Sekretariat	0
2	Bidang Perikanan Tangkap	0
3	Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil	0
4	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	0
5	Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	0
6	Cabang Dinas Kelautan Wil. Barat	0
7	Cabang Dinas Kelautan Wil. Timur	0
8	Cabang Dinas Kelautan Wil. Selatan	0
9	Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	0
10	Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut	0
11	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan	0
12	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak	0
13	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang	0
14	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong	0
15	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	0
16	Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari	0
17	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto	0
18	Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor	0
19	Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending	0
20	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung	0
21	Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo	0
22	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa	0
	JUMLAH TOTAL	0

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Evaluasi atas implementasi penanganan benturan kepentingan yang sudah dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

A. Sosialisasi

Sosialisasi benturan kepentingan dilaksanakan secara *hybrid* yang dihadiri sebagian Eselon III dan IV secara luring dan perwakilan masing-masing bidang, CDK, dan UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah secara daring sebagaimana **lampiran 1**. Dalam sosialisasi dijelaskan mengenai bentuk-bentuk benturan kepentingan dan pengendalian yang dapat dilakukan sebagai langkah preventif dalam menghadapi dan mencegah terjadinya benturan kepentingan.

B. Identifikasi

Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan pemutakhiran pada tanggal 25 Juli 2024 di aplikasi SIBEKEN yang sebelumnya telah melalui proses reviu oleh Inspektorat untuk menyesuaikan substansi yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pasal 7 Ayat (3) (**Lampiran 2**).

C. Pencegahan

Pencegahan perlu disempurnakan dengan pemutakhiran hasil identifikasi sehingga lebih jelas dan lengkap serta akan mempermudah dalam implementasi pencegahan di lapangan sebagaimana **lampiran 2**.

D. Penanganan Benturan Kepentingan

Beberapa evaluasi penanganan benturan kepentingan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Semester I Tahun 2024, yaitu:

1. Masih ada pegawai yang belum memahami sepenuhnya mengenai 7 (tujuh) macam jenis korupsi sesuai UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dilakukan sosialisasi di setiap tahunnya sebagai pengingat dan peningkatan wawasan ;
2. Personil dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Nomor 523/5303/XI/2021 tanggal 08 November 2021 secara berkelanjutan memberikan pemahaman pada Bidang, UPT atau Cabang Dinas masing-masing

mengenai potensi benturan kepentingan dan Langkah-langkah preventif dalam menghadapinya.

E. Pelaporan

Pada Semester I Tahun 2024 tidak ada laporan mengenai benturan kepentingan. Dalam hal ini yang terpenting adalah upaya pencegahan secara regular terus dilakukan, selain itu melakukan monitoring sehingga upaya pencegahan menimbulkan dampak positif dalam lingkungan kerja.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan Laporan Evaluasi Internal Penanganan Benturan Kepentingan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Semester I Tahun 2024, antara lain:

1. Sosialisasi terhadap seluruh pegawai telah dilaksanakan secara *hybrid* yang dihadiri secara luring oleh Sebagian pejabat Eselon III dan IV dan perwakilan masing-masing bidang/UPT/CDK;
2. Telah dilaksanakan pemutakhiran Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 pada tanggal 25 Juli 2024 pada aplikasi SIBEKEN yang sebelumnya telah melalui proses revidi dari Inspektorat;
3. Pada Semester I Tahun 2024 tidak ada laporan mengenai terjadinya benturan kepentingan.

B. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut terhadap Laporan Evaluasi Internal Penanganan Benturan Kepentingan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Semester I Tahun 2024, antara lain:

1. Sosialisasi mengenai benturan kepentingan dan langkah-langkah preventifnya dilakukan secara berkala terhadap seluruh pegawai;
2. Hasil identifikasi benturan kepentingan perlu lebih diupayakan kegiatan pencegahannya dan memaksimalkan upaya pendokumentasian penanganan secara lebih lengkap dan regular. Selain itu juga memperbarui identifikasi sesuai dengan keadaan terkini;
3. Tim Benturan Kepentingan senantiasa aktif dalam melaksanakan tugas dan meningkatkan kerjasama tim dalam penanganan benturan kepentingan.

LAMPIRAN 1



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Imam Bonjol No. 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon 024-3546469, 3546607
Faksimile 024-3551289 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dkp@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

- Kepada Yth. :
1. SEKRETARIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 2. KEPALA BIDANG PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN
 3. KEPALA BIDANG KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
 4. KEPALA BIDANG USAHA DAN PENGEMBANGAN KOMODITAS
 5. KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP
 6. KEPALA CABANG DINAS KELAUTAN WILAYAH BARAT
 7. KEPALA CABANG DINAS KELAUTAN WILAYAH TIMUR
 8. KEPALA CABANG DINAS KELAUTAN WILAYAH SELATAN
 9. KEPALA BALAI BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU DAN LAUT
 10. KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN
 11. KEPALA BALAI LABORATORIUM PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN
 12. KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI LOHGENDING
 13. KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI BAJOMULYO
 14. KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TASIKAGUNG
 15. KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI KLIDANGLOR
 16. KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MORODEMAK
 17. KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAWANG
 18. KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI ASEMDOYONG
 19. KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI WONOKERTO
 20. KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TEGALSARI
 21. KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI LARANGAN
 22. KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI KARIMUNJAWA

Lewat Yth. :-

Dari : KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tembusan :

Tanggal : 15 Juli 2024

Nomor : 523.1/1112

Hal : Upgrading dan Pembahasan Laporan Benturan Kepentingan Semester I Tahun 2024

Menindaklanjuti Surat Edaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Nomor 001.3/130 tentang Permohonan Penyampaian Laporan Evaluasi Internal Benturan Kepentingan Semester I Tahun 2024, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah akan menyelenggarakan *Upgrading* dan Pembahasan Laporan Benturan Kepentingan Semester I Tahun 2024, yang akan dilaksanakan pada

- Hari/Tanggal : Jumat/19 Juli 2024
- Jam : 08.30 WIB s.d. selesai.
- Tempat : **Luring** :

Ruang *Command Center* Lt. I

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

Daring (Zoom Meeting):

Link : 539 510 4674

Passcode : DKP134

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Balai hadir secara luring, sedangkan Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai, Cabang Dinas Kelautan, Ketua Tim Pokja, Para Pejabat Eselon IV atau yang disetarakan hadir secara daring. Sebagai materi pembahasan pada kegiatan tersebut, Bidang/UPT/CDK untuk mengisi matriks pada link <https://s.id/SIBEKEN2024> selambatnya 17 Juli 2024. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Humairoh H Hanifah (081390106004).

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Ir. FENDIAWAN TISKIANTORO, M.Si
Pembina Utama Madya

NIP 19650117-199010 1 001

Presensi Kegiatan Upgrading dan Pembahasan Benturan Kepentingan Semester I Tahun 2024

Timestamp	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Jabatan	Bidang/UPT/CDK	No. HP/WA
19/07/2024 8:44:47	ifdlol syukri	Laki-laki	kepala ppp	ppp tawang	081215117001
19/07/2024 8:49:32	MOHAMMAD ABROR SATRIYO, S.Pi	Laki-laki	PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP AHLI PERTAMA	PPP LARANGAN	085713045712
19/07/2024 8:50:13	Dwi Rachmanto	Laki-laki	Kasi Konservasi	CDK Barat	082312116915
19/07/2024 8:54:36	Ariyanto	Laki-laki	Kasubag TU	Ppp Lohgending	085261690489
19/07/2024 8:54:48	Amrullah Sigit	Laki-laki	Kepala pelabuhan	Pelabuhan perikanan pantai	081326361377
19/07/2024 8:57:03	Erriyuliyanti	Perempuan	Staff	PPP Tegalsari	081932074030
19/07/2024 9:09:12	Karunia Akbar, S.Kel, M.P.W.K, M.Eng	Laki-laki	Kasubag TU	PPP Wonokerto	081228506390
19/07/2024 9:12:22	Amalia Rofiah, S.kel	Perempuan	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	PPP Wonokerto	085712090651
19/07/2024 9:16:47	Farah Elalfa Fauziah	Perempuan	Pengelola produksi perikanan tangkap	PPP WONOKERTO	082323023186
19/07/2024 9:58:29	Benovita Dwi Saraswati	Perempuan	PELP	KP3K	087832241947
19/07/2024 9:58:38	Samuel Jati Jiwo Kusumo	Laki-laki	Kasubag Tu CDKWB	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	082134561441
19/07/2024 9:59:23	Setyo handayani	Perempuan	Kepala Seksi Konservasi, Rehabilitasi dan Perizinan	CDK Wil Selatan	085702301497
19/07/2024 9:59:26	Yunus Mintarso, SPi. MSi.	Laki-laki	Kepala Pelabuhan Perikanan	PPP Tasikagung	085600390509
19/07/2024 10:00:45	Rofik Muammar	Laki-laki	Kapokja Kepelabuhanan dan Kenelayanan	Bidang Perikanan Tangkap	085277639882
19/07/2024 10:01:03	Aldise Kresna Dewi Tutianvia, S.Pi, M.Pi	Perempuan	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	PPP Morodemak	08112705353
19/07/2024 10:06:18	Aries Kusmiarno	Laki-laki	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	Pelabuhan Perikanan Pantai Klidang Lor	081229925500
19/07/2024 10:11:55	ANTON BUDIARTO	Laki-laki	Pengolah data dan Informasi	Subbag Keuangan	081228720111
19/07/2024 10:16:38	Febriari Elis Tri Susanti, S.Pi	Perempuan	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	PPP Lohgending	081273220014
19/07/2024 10:18:22	Safiun Nizar	Laki-laki	KaSubBag Tata Usaha	PPP Karimunjawa	081290726774

19/07/2024 10:22:35	EFI SUSIANTI, SE	Perempuan	Pengolah data anggaran dan perbendaharaan	Sekretariat	082134234267
19/07/2024 10:23:33	Khairunnas ST. M.Eng	Laki-laki	Kasi Pengawasan	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	085747444862
19/07/2024 10:23:39	Setyowati	Perempuan	Ka Cabang Dinas	CDK Wilayah Selatan	081328181258
19/07/2024 10:29:42	Dessy Amelia Sekar Dita	Perempuan	Kasi Konservasi, Rehabilitasi dan Perizinan	CDK Wilayah Timur	085290854424
19/07/2024 10:39:36	Kurnia adi	Laki-laki	Ka Pelabuhan	PPP morodemak	081325892517
19/07/2024 10:46:31	Aris Setijono	Laki-laki	Kepala	BBIAPL	08562688118
19/07/2024 10:48:47	Imam Faiz Farkhani	Laki-laki	Analisis Pembangunan Pelabuhan Perikanan	PPP Bajomulyo	085732134684
19/07/2024 10:52:10	Chammad Mudzakkir	Laki-laki	Kepala PPP Klidang Lor	PPP Klidang Lor	081390151528
19/07/2024 10:53:16	HENI DWI SUSILOWATI	Perempuan	Pengolah Data Anggaran dan Perbendaharaan	Sekretariat	081325740877
19/07/2024 10:54:17	HENI DWI SUSILOWATI	Perempuan	Pengolah Data Anggaran dan Perbendaharaan	Sekretariat	081325740877
19/07/2024 11:03:18	Pujiyani, SH	Perempuan	Ka sub bag TU	PPP Klidanglor	081328827307
19/07/2024 11:12:26	Dina Mayasari	Perempuan	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda	BIDANG UPK	08122535474
19/07/2024 11:12:33	Adhi Nugroho	Laki-laki	pelaksana	KP3K	081345764640
19/07/2024 11:13:31	Purwindarti Okvita	Perempuan	Kasi pengawasan	CDK Wil Selatan	081226830422
19/07/2024 11:14:49	Imam Nursanto	Laki-laki	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda	KP3K	082133345629
19/07/2024 11:15:02	Dita Arischa Tiyavanka	Perempuan	Verifikator Keuangan	Sekretariat	085212560192
19/07/2024 11:16:10	SAIFUDDIN, ST	Laki-laki	Kepala	PPP KARIMUNJAWA	081325341991
19/07/2024 11:16:10	Ahmad Khamim Mubarak	Laki-laki	Staf	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	082314383838
19/07/2024 11:17:27	Aprilia Putri Nugrahaeni S., S. Ak	Perempuan	Staf Administrasi Keuangan	PPP Klidang Lor	089510619134
19/07/2024 11:18:00	Santosa, SP., MM.	Laki-laki	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	BPMHP	091252035576
19/07/2024 11:19:54	Sefti Wulanningrum, S.Pi	Perempuan	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama	PPP Tawang	082221956814
19/07/2024 11:20:25	Iman Kadarusman	Laki-laki	Kwapa Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	082127343344

19/07/2024 11:20:27	Arnita Ayu Kusumawati	Perempuan	Analisis Pasar Hasil Perikanan	UPK	085866405504
19/07/2024 11:20:45	ENY DWI LESTARI, S.Pi	Perempuan	Analisis Akuakultur Ahli Muda	BBIAPL Kelas A	081770597895
19/07/2024 11:23:16	Sakur.SP	Laki-laki	suk koordinator tatakelola dan pelayanan usaha	PPP Tasikagung	081325467826
19/07/2024 11:24:28	Pramudita Rahajeng Anindya	Perempuan	Staf	Bidang Perikanan Tangkap	081392147714
19/07/2024 11:24:39	Ikke retno safitri	Perempuan	Staf	Bidang perikanan tangkap	085726836009
19/07/2024 11:28:34	Nur Anwar, ST, M.Si.	Laki-laki	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	PPPPL Asemboyong	081325741392
19/07/2024 11:31:01	MUHAMAD IMAM RIFAI, S.Pi	Laki-laki	PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP AHLI PERTAMA	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI ASEMDOYONG PEMALANG	083862175234
19/07/2024 11:33:36	Novi Kusumaning Tyas	Perempuan	STAFF PPP ASEMDOYONG	PPP ASEMDOYONG	085326735525
19/07/2024 11:38:40	Peris Risky Triwiguna	Laki-laki	Non ASN	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemboyong	089634817500
19/07/2024 11:40:19	Meina siska Prihatin	Perempuan	Penata kelola kelautan dan perikanan	PPP Asemboyong	081935033313
19/07/2024 11:41:00	Weni Puspitasari	Perempuan	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan (Non ASN)	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemboyong	085141205007
19/07/2024 11:41:02	Zaenal Abidin	Laki-laki	Pramubakti	PPP Asemboyong	085642927436
19/07/2024 11:41:43	DESSY AYU SETYAWATI	Perempuan	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI ASEMDOYONG	081809084774
19/07/2024 11:49:09	Casrinah	Perempuan	Pengelola Kepelabuhan	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemboyong	08139199445
19/07/2024 11:54:21	Amrullah Sigit	Laki-laki	Kepala pelabuhan	Pelabuhan perikanan pantai larangan	081326361377
19/07/2024 12:02:32	Hermin Fewi	Perempuan	Kepala Balai	BPMHP	081914139796
19/07/2024 12:04:37	RINI SUSIANAWATI	Perempuan	Analisis Mutu Hasil Perikanan	BPMHP Kelas A Semarang	081325029163
19/07/2024 12:44:49	Bambang Supriyanto, SH.	Laki-laki	Kasubag Tata Usaha	Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut	08156608007
19/07/2024 12:50:07	Rima Susiati, S.Pi	Perempuan	Pengelola Kepelabuhan Perikanan	PPP Tegalsari	08156650566

NOTULEN RAKOR KEGIATAN BENTURAN KEPENTINGAN

Jumat, 19 Juli 2024

No.	Nama	Uraian
1.	Pak Lilik	- Tindakan korupsi bagaimanapun bentuk dan nominalnya merupakan tindakan melawan hukum. - Salah satu bentuk tindakan korupsi adalah benturan kepentingan. - Benturan kepentingan dapat menyebabkan pelayanan publik yang memburuk, kebijakan yang tidak efisien dan tidak efektif, keputusan dan tindakan yang berpotensi menguntungkan pribadi atau orang lain, serta kerugian yang ditimbulkan bagi orang lain atau negara. - Menahan diri untuk tidak lebih banyak berbuat buruk.
2.	Pak Eva Pratama Nur Fitrianto (Inspektorat)	- Benturan kepentingan lebih dominan pada <i>soft skill</i>/kesadaran seseorang. - Pelanggaran terkait benturan kepentingan bisa bermuara kepada pelanggaran hukum atau kode etik. - Kasus Anwar Usman termasuk pelanggaran benturan kepentingan. - Walaupun kita belum bisa merubah sistem maka kita mulai dari diri kita sendiri. - Apabila ada suap/gratifikasi maka harus dikembalikan dan laporkan (aplikasi gratifikasi online). - Nilai-nilai anti korupsi : jujur, kemandirian, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, kerja keras. - Gratifikasi/benturan kepentingan merupakan akar dari korupsi. - Pulang perjalanan dinas mendapat oleh-oleh merupakan bentuk gratifikasi. - Penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi merupakan bentuk benturan kepentingan. - Apabila ada bentuk benturan kepentingan yang dilegalkan negara, tidak apa-apa diikuti saja. - Penyuaian lebih dominan pada transaksional, Gratifikasi lebih dominan sikap pasif, Pemerasan lebih dominan sikap aktif. - Benturan kepentingan PBJ, contoh : seorang PNS DKP punya PT dan mengikuti PBJ di DKP. - Undang-undang no 31/1999 jo. Undang-undang No. 20/2001 → pegawai negeri. - Gratifikasi terbagi dua, yaitu : negatif dan positif (tidak wajib dilaporkan). - Gratifikasi makanan sebaiknya diberikan pada yang membutuhkan kemudian didokumentasikan dan dilaporkan. - Pergub Jateng No. 46 tahun 2020 → Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan. - Inti benturan kepentingan : Hubungan afiliasi/kekeluargaan, situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan dengan pihak lain yang memiliki kepentingan atas keputusan sehubungan dengan jabatannya. - Kanal aplikasi benturan kepentingan di Prov. Jateng = Si-BEKEN. - Segala jenis pidana pasti ada benturan kepentingan. - Mohon tanggapan pada link → https:// bit.ly/TanggapanPesertaSosialisasi TAGGAPAN PAK CHAMAT - Hindari kata/kalimat yang sensitif saat menjawab pertanyaan. - Kondisi Jateng masih buruk dalam hal anti korupsi.
3.	Pak Chamat	- PPP Klidang Lor : setoran retribusi 19 kapal menjadi 1 STS, sekarang semua non tunai.

No.	Nama	Uraian
		- Gratifikasi sulit dihilangkan, maka kiatnya : seorang kepala tidak meminta kecuali yang bersifat umum, mengamankan pendapatan dengan cara non tunai. - DKP Jateng memiliki komitmen yang bagus. - Di kondisi tertentu, ikan pemberian (tidak mau dibayar) hanya cukup dikonsumsi sendiri.



UPGRADING DAN PEMBAHASAN LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN SEMESTER I TAHUN 2024

● DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Oleh:
Eva Pratama Nur Fitrianto

INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 19 Juli 2024

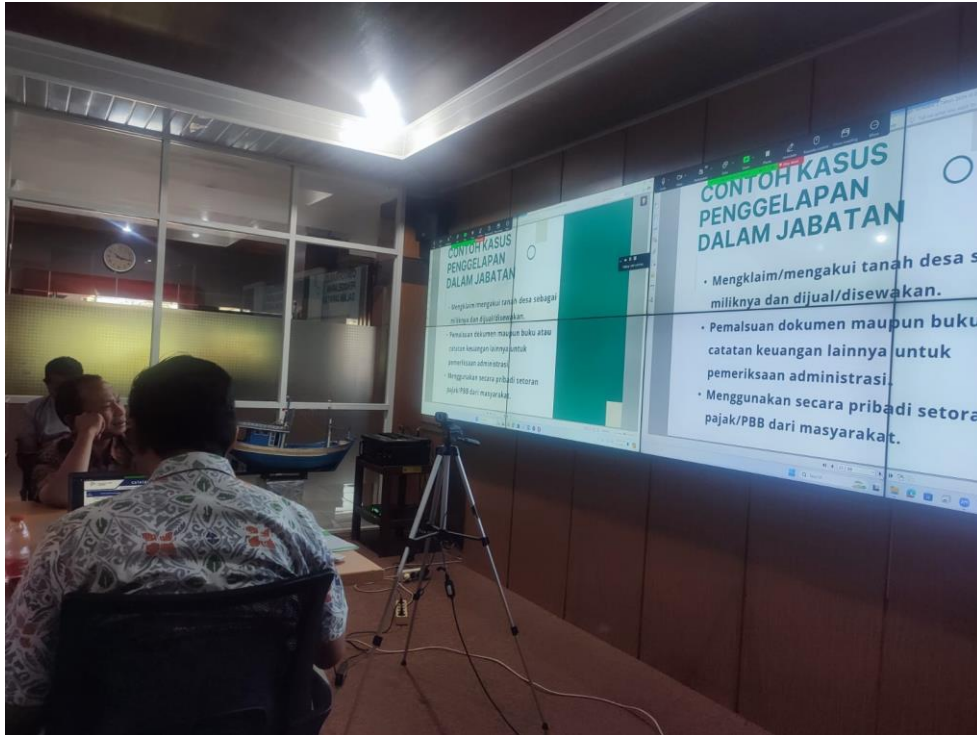


**DALAM
PERSPEKTIF
HUKUM**

UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 JUNCTO UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2001

DOKUMENTASI SOSIALISASI BENTURAN KEPENTINGAN





LAMPIRAN 2

FORM BENTURAN KEPENTINGAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024

No	Bidang/UPT/CDK	Sumber/Jenis Benturan Kepentingan*	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Detail/Bentuk Benturan Kepentingan	Penyebab	Pencegahan
	SEMESTER 1					
1	Bidang Perikanan Tangkap (SDI dan PPI KAPI)	Gratifikasi	Kepala bidang, Kepala seksi, Staf	Pemberian gratifikasi pada saat melaksanakan gerai perizinan di lapangan dengan harapan terbangunnya hubungan baik	1. Ketidapahaman terkait peraturan gratifikasi 2. Perilaku pengurus/pemilik kapal yang ingin segera selesai dokumen perijinan	1. Sosialisasi terkait benturan kepentingan 2. Penguatan nilai-nilai integritas yang disisipkan dalam forum-forum 3. Evaluasi dan pengendalian internal 4. Dokumen Surat Perintah Tugas (SPT) Perjalanan Dinas tercantum perintah tidak menerima gratifikasi
2	Bidang Perikanan Tangkap (Kepelabuhanan dan Kenelayanan)	Gratifikasi dan Hubungan Afiliasi	Kepala bidang, kepala seksi, staf	Penyedia memberikan gratifikasi kepada PPK	Penyedia mengharapkan menjadi pelaksana barang jasa akan tetapi tidak mau mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku	Bertindak secara profesional dengan mengutamakan integritas dan meminta pendampingan dari APIP
	SEMESTER 2					
1	Bidang Perikanan Tangkap (SDI dan PPI KAPI)	Gratifikasi	Pemberian gratifikasi pada saat melaksanakan gerai perizinan di lapangan dengan	1. Ketidapahaman terkait peraturan gratifikasi 2. Perilaku pengurus/pemilik	Kurangnya pemahaman mengenai peraturan yang berlaku	1. Sosialisasi terkait benturan kepentingan 2. Penguatan nilai-nilai integritas yang disisipkan dalam forum-forum

			harapan terbangunnya hubungan baik	kapal yang ingin segera selesai dokumen perijinan		3. Evaluasi dan pengendalian internal 4. Dokumen Surat Perintah Tugas (SPT) Perjalanan Dinas tercantum perintah tidak menerima gratifikasi
		Gratifikasi dan Hubungan Afiliasi	Pemilihan rekanan dlm pengadaan hibah barang/jasa	Rekanan yang menginginkan salah satu proyek hibah barang/jasa akan tetapi tidak mau mengikuti persyaratan dan ketentuan yang berlaku	Kurangnya pemahaman mengenai peraturan yang berlaku	Proses pemilihan penyedia barang/jasa secara profesional dan sesuai prosedur
2	Bidang Perikanan Tangkap (Kepelabuhanan dan Kenelayanan)	Gratifikasi	Pemberian gratifikasi saat pelaksanaan pemilihan penyedia barang jasa	Penyedia memberikan gratifikasi kepada PPK	Penyedia mengharapkan menjadi pelaksana barang jasa akan tetapi tidak mau mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku	bertindak secara profesional dengan mengutamakan integritas dan meminta pendampingan dari APIP
	SEMESTER I					
1	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	Gratifikasi	Kepala Bidang, Sub Koordinator dan staff	Pemberian gratifikasi pada saat melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan di lapangan dengan harapan terbangunnya hubungan baik	Ketidakpahaman terkait peraturan gratifikasi	1. Sosialisasi terkait benturan kepentingan 2. Penguatan nilai-nilai integritas yang disisipkan dalam forum-forum 3. Dokumen Surat Perintah Tugas (SPT) Perjalanan Dinas tercantum perintah tidak menerima gratifikasi

2	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	Hubungan Afiliasi	Pejabat Pembuat Komitmen dan PPTK	Pemilihan penyedia barang/jasa tidak sesuai spesifikasi	Adanya hubungan pertemanan	1. Proses pemilihan penyedia barang/jasa secara profesional sesuai prosedur 2. Proses pengadaan barang/jasa melalui e-Purchasing
	SEMESTER II					
1	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	Gratifikasi	Kepala Bidang, Sub Koordinator dan staff	Pemberian gratifikasi pada saat melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan di lapangan dengan harapan terbangunnya hubungan baik	1. Ketidakhahaman terkait peraturan gratifikasi 2. Perilaku pelaku usaha baik pembudidaya maupun pengolah yang ingin segera selesai dokumen perijinan	1. Sosialisasi terkait benturan kepentingan 2. Penguatan nilai-nilai integritas yang disisipkan dalam forum-forum 3. Dokumen Surat Perintah Tugas (SPT) Perjalanan Dinas tercantum perintah tidak menerima gratifikasi
2	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	Hubungan Afiliasi	Pejabat Pembuat Komitmen dan PPTK	Pemilihan penyedia barang/jasa tidak sesuai spesifikasi	Adanya hubungan pertemanan	1. Proses pemilihan penyedia barang/jasa secara profesional sesuai prosedur 2. Proses pengadaan barang/jasa melalui e-Purchasing

1	Bidang KP3K - PRL	Gratifikasi	Kepala Bidang KP3K, Kepala Seksi, Staf	Pemberian gratifikasi kepada petugas saat melaksanakan penilaian, verifikasi maupun monitoring KKPRL di lapangan dengan harapan terbangunnya hubungan baik	1. Ketidakhahaman terkait peraturan gratifikasi 2. Perilaku KKPRL / perusahaan yang ingin segera selesai dokumen KKPRL	1. Sosialisasi terkait benturan kepentingan 2. Penguatan nilai-nilai integritas yang disisipkan dalam forum-forum 3. Evaluasi dan pengendalian internal 4. Dokumen Surat Perintah Tugas (SPT) Perjalanan Dinas tercantum perintah tidak menerima gratifikasi
2	Bidang KP3K - PRL	Gratifikasi dan Hubungan Afiliasi	Kepala Bidang KP3K	Pemberian gratifikasi saat pelaksanaan pemilihan penyedia barang jasa pelaksana kajian kawasan konservasi kepada kepala bidang , sub koordinator atau pokja PBJ	Penyedia mengharapkan menjadi pelaksana barang jasa akan tetapi ingin mempersingkat proses , tidak mau mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku	Bertindak secara profesional dengan mengutamakan integritas dan meminta pendampingan dari APIP
3	Bidang KP3K - PEMP	Gratifikasi dan Hubungan Afiliasi	Kepala Bidang KP3K	Pemilihan rekanan dlm pengadaan hibah barang/jasa PUGAR / Kelompok Wanita Pesisir / Klp Taruna Pesisir,	Rekanan yang menginginkan salah satu proyek hibah barang/jasa akan tetapi tidak mau mengikuti persyaratan dan ketentuan yang berlaku	Proses pemilihan penyedia barang/jasa secara profesional dan sesuai prosedur

4	Bidang KP3K - PEMP	Gratifikasi	Kepala Bidang KP3K	Gratifikasi dari penerima bantuan	Menginginkan agar penerima bantuan dapat diberikan bantuan kembali sesering mungkin	Membuat pernyataan dalam Pakta Integritas yang menyatakan bahwa penerima bantuan tidak akan melakukan gratifikasi serta praktek KKN lainnya pada pemilik pekerjaan serta melakukan verifikasi kelompok bersama-sama dengan Dinas kabupaten/kota terkait
1	PSDKP	Gratifikasi	Pengawas Perikanan	Pengawas perikanan menerima gratifikasi dari pelaku usaha yang diawasi, pemberian gratifikasi kepada pengawas perikanan saat melaksanakan pengawasan, inspeksi di lapangan dengan harapan pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan lancar	Pelaku usaha mengharapkan nilai pengawasan yang baik dan Ketidakpahaman pelaku usaha mengenai gratifikasi	Pembinaan integritas bagi pengawas perikanan dan sosialisasi terkait gratifikasi pada pelaku usaha
2	PSDKP	Hubungan afiliasi	Pengawas Perikanan	Hasil pengawasan tidak obyektif	Pelaku usaha memiliki hubungan relasi (saudara, teman, kenalan dll) sehingga mempengaruhi obyektifitas hasil pengawasan	Pembinaan integritas bagi pengawas perikanan

3	PSDKP	Kelemahan sistem organisasi	Kepala Bidang PSDKP	Tugas dan fungsi POKMASWAS kurang efektif	Bidang PSDKP tidak memiliki anggaran untuk membantu penyediaan sarana prasarana	Melakukan pembinaan melalui kegiatan sosialisasi peraturan yang berlaku
4	PSDKP	Kepentingan Pribadi	Pengawas perikanan	Hasil sitaan barang bukti tidak dilaporkan	Digunakan untuk kepentingan pribadi	Melakukan inventaris pada barang bukti sitaan dan membuat pelaporan
1.	CDK BARAT	Hubungan Afiliasi	Kepala dan Staf Seksi Konservasi, Rehabilitasi dan Perizinan dan Penyedia Barang / Jasa	Barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang diusulkan	Adanya hubungan afiliasi / kedekatan dengan penyedia barang / jasa	Proses pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan secara profesional sesuai prosedur yang berlaku
2	CDK BARAT	Gratifikasi	Petugas yang melaksanakan pelayanan perizinan	Pemberian gratifikasi kepada petugas saat melaksanakan pelayanan dan verifikasi dengan harapan perizinan dapat lebih cepat terbit	Ketidakpahaman pemohon perizinan terkait peraturan gratifikasi	1. Sosialisasi terkait benturan kepentingan 2. Penguatan nilai-nilai integritas yang disisipkan dalam forum-forum 3. Evaluasi dan pengendalian internal 4. Dokumen Surat Perintah Tugas (SPT) Perjalanan Dinas tercantum perintah tidak menerima gratifikasi

3	CDK BARAT	Gratifikasi	Pengawas Perikanan	Pemberian gratifikasi kepada petugas saat melaksanakan pengawasan pelaku usaha dan patroli kapal perikanan	Ketidakpahaman pelaku usaha pada aturan perundang-undangan yang berlaku	1. Sosialisasi terkait aturan perundangan 2. Penguatan nilai-nilai integritas yang disisipkan dalam forum-forum 3. Evaluasi dan pengendalian internal
4	CDK BARAT	Kelemahan Sistem Organisasi	Kepala dan Staf Seksi Pengawasan	Terjadi overlapping kegiatan antara Seksi Pengawasan dan Bidang PSDKP	Objek pengawasan dan wilayah kerja yang sama	Sinkronisasi kegiatan dan koordinasi kegiatan pengawasan
1	CDK SELATAN	Hubungan Afiliasi	Kepala dan Staf Seksi Konservasi, Rehabilitasi dan Perizinan dan Penyedia Barang / Jasa	Barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang diusulkan	Adanya hubungan afiliasi / kedekatan dengan penyedia barang / jasa	Proses pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan secara profesional sesuai prosedur yang berlaku
2	CDK SELATAN	Gratifikasi	Petugas yang melaksanakan pelayanan perizinan	Pemberian gratifikasi kepada petugas saat melaksanakan pelayanan dan verifikasi dengan harapan perizinan dapat lebih cepat terbit	Ketidakpahaman pemohon perizinan terkait peraturan gratifikasi	1. Sosialisasi terkait benturan kepentingan 2. Penguatan nilai-nilai integritas yang disisipkan dalam forum-forum 3. Evaluasi dan pengendalian internal 4. Dokumen Surat Perintah Tugas (SPT) Perjalanan Dinas tercantum perintah tidak menerima gratifikasi

3	CDK SELATAN	Gratifikasi	Pengawas Perikanan	Pemberian gratifikasi kepada petugas saat melaksanakan pengawasan pelaku usaha dan patroli kapal perikanan	Ketidakpahaman pelaku usaha pada aturan perundang-undangan yang berlaku	1. Sosialisasi terkait aturan perundangan 2. Penguatan nilai-nilai integritas yang disisipkan dalam forum-forum 3. Evaluasi dan pengendalian internal
4	CDK SELATAN	Kelemahan Sistem Organisasi	Kepala dan Staf Seksi Pengawasan	Terjadi overlapping kegiatan antara Seksi Pengawasan dan Bidang PSDKP	Objek pengawasan dan wilayah kerja yang sama	Sinkronisasi kegiatan dan koordinasi kegiatan pengawasan
	CDK TIMUR	Hubungan Afiliasi	Kepala dan Staf Seksi Konservasi, Rehabilitasi dan Perizinan dan Penyedia Barang / Jasa	Barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang diusulkan	Adanya hubungan afiliasi / kedekatan dengan penyedia barang / jasa	Proses pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan secara profesional sesuai prosedur yang berlaku
	CDK TIMUR	Gratifikasi	Petugas yang melaksanakan pelayanan perizinan	Pemberian gratifikasi kepada petugas saat melaksanakan pelayanan dan verifikasi dengan harapan perizinan dapat lebih cepat terbit	Ketidakpahaman pemohon perizinan terkait peraturan gratifikasi	1. Sosialisasi terkait benturan kepentingan 2. Penguatan nilai-nilai integritas yang disisipkan dalam forum-forum 3. Evaluasi dan pengendalian internal 4. Dokumen Surat Perintah Tugas (SPT) Perjalanan Dinas tercantum perintah tidak menerima gratifikasi

	CDK TIMUR	Gratifikasi	Pengawas Perikanan	Pemberian gratifikasi kepada petugas saat melaksanakan pengawasan pelaku usaha dan patroli kapal perikanan	Ketidakpahaman pelaku usaha pada aturan perundang-undangan yang berlaku	1. Sosialisasi terkait aturan perundangan 2. Penguatan nilai-nilai integritas yang disisipkan dalam forum-forum 3. Evaluasi dan pengendalian internal
	CDK TIMUR	Kelemahan Sistem Organisasi	Kepala dan Staf Seksi Pengawasan	Terjadi overlapping kegiatan antara Seksi Pengawasan dan Bidang PSDKP	Objek pengawasan dan wilayah kerja yang sama	Sinkronisasi kegiatan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengawasan
1	BBIAPL Kelas A	Gratifikasi	Kepala BBIAPL Kelas A dan Penyedia barang/jasa	adanya pemberian gratifikasi pada saat pemilihan penyedia barang/jasa	adanya hubungan afiliasi/pertemanan dengan penyedia jasa	Proses Pemilihan penyedia barang/jasa dilakuka secara profesional sesuai prosedur yang berlaku, komitmen untuk tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun
2	BBIAPL Kelas A	Hubungan Afiliasi	Kepala BBIAPL Kelas A dan Penyedia barang/jasa	barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang diusulkan	adanya hubungan afiliasi/pertemanan dengan penyedia jasa	Proses Pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan secara profesional sesuai prosedur yang berlaku
3	BBIAPL Kelas A	Kelemahan Sistem Organisasi	Kepala BBIAPL Kelas A dan penyewa lahan	Pembayaran retribusi sewa lahan tidak dilakukan dalam 1 kali pembayaran (dilakukan dalam 2	penyewa lahan tidak mampu membayar sewa lahan sekaligus karena pendapatan usaha menurun.	Pemutakhiran SOP dengan menjelaskan di dalam surat perjanjian sewa lahan bahwa pembayaran retribusi dilakukan sebanyak 2 termin.

				termin/per-semester)		
1	BLPKIL	Hubungan Afiliasi	Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan BLPKIL	Barang / Jasa yang diterima tidak sesuai spesifikasi pengusulan	Ketersediaan barang / jasa di penyedia belum tersedia atau harus inden	spesifikasi barang / jasa harus dilakukan secara profesional sesuai prosedur dan diverifikasi oleh pengguna barang / jasa serta dipastikan ketersediaan barang / jasa yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan
2	BLPKIL	Kelemahan Sistem Organisasi	Kepala BLPKIL, Sub Koordinator Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan, Penyelia, Analis , dan petugas Penerima Sampel	Penerbitan Lembar Hasil Uji melebihi batas waktu sehingga terus menerus ditanyakan oleh pelanggan	Banyaknya jumlah sampel yang masuk sehingga proses pengujian menumpuk	Meningkatkan kepatuhan petugas laboratorium terhadap SOP Pengujian Sampel
3	BLPKIL	Kelemahan Sistem Organisasi	Kepala BLPKIL, Sub Koordinator Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan, Penyelia, dan Analis	Limbah Laboratorium BLPKIL belum ditangani dengan baik	Belum adanya Instalasi Penanganan Limbah Laboratorium	Menyimpan Limbah Laboratorium dalam wadah tertentu, serta tidak membuang limbah sembarangan

1	BPMHP Kelas A	Hubungan Afiliasi	Penerima Barang / Jasa	Barang / Jasa yang diterima tidak sesuai spesifikasi pengusulan	keakraban dengan penyedia barang dan jasa	spesifikasi barang / jasa harus diverifikasi oleh pengguna barang / jasa serta dilakukan audit internal secara berkala
2	BPMHP Kelas A	Hubungan Afiliasi	Pengelola Pelaporan Hasil Pengujian, Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Merubah hasil uji yang terdapat laporan hasil pengujian (CAT)	keakraban dengan pelanggan	Laporan Hasil Pengujian (CAT) diverifikasi oleh penyelia dan penanggung jawab teknis pengujian sebelum ditandatangani Kepala BPMHP
3	BPMHP Kelas A	Gratifikasi	Pembina Mutu / Tim Sertifikasi GMP / Evaluator Sertifikasi SNI	Pemberian gratifikasi pada saat melaksanakan kegiatan pembinaan pra-SKP dan sertifikasi SPPT SNI oleh pelaku usaha dengan harapan hasil pembinaan / sertifikasi dianggap sesuai / memenuhi	keakraban pelaku usaha dengan personel yang melakukan kegiatan	Melakukan pergantian / rotasi personel agar tidak melakukan kegiatan secara berturut - turut pada pelaku usaha yang sama
1	PPP Morodemak	Akses khusus kepada pihak tertentu	Kepala PPP Morodemak, Petugas Pelayanan	Memberikan alokasi sewa lahan/kios kepada orang tertentu tanpa mekanisme yang benar	hubungan pertemanan dengan pihak tertentu sehingga mempengaruhi keputusan	Pemberian pemahaman tentang mekanisme yang benar dalam perjanjian sewa lahan, Evaluasi dan pengendalian internal yang berjenjang

2	PPP Morodemak	Gratifikasi	Petugas pelayanan dan pengguna jasa layanan	pelaku usaha ingin perizinan dokumen berlayar yang diajukan lebih cepat diterbitkan meski tidak sesuai SOP dan dokumen persyaratan kurang	Hubungan pertemanan dan keakraban petugas dengan pengguna jasa	Seluruh proses pengajuan dan verifikasi dokumen secara online, penerapan kedisiplinan dan SOP secara tegas
3	PPP Morodemak	Kelamahan Sistem Organisasi	Pegawai di PPP Morodemak	Kendali absensi yang perlu dirapihkan untuk meningkatkan ketertiban pegawai di PPP Morodemak berkaitan dengan kehadiran dan jam kerja	Tidak adanya sistem absensi non ASN dengan Fingerprint di PPP Morodemak	Pengadaan Alat Absensi Fingerprint
4	PPP Morodemak	Hubungan Afiliasi	KPA,PPTK	KPA dan PPTK memilih penyedia barang/jasa yang sudah dikenal	KPA dan PPTK merasa bahwa jika penyedia barang/jasa dari orang yang dikenal, maka kegiatan penyediaan akan terlaksana dengan baik, barang/jasa yang tersedia sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan	Proses pengadaan barang/jasa melalui prosedur yang telah ditentukan
1	PPP Asemdayong	Kelemahan Sistem Organisasi	Kepala PPP Asemdayong	Penerbitan rekomendasi BBM subsidi di PPP Asemdayong terhambat karena dokumen pemohon	Dokumen kapal tidak lengkap, kelemahan permodalan nelayan	Sosialisasi, Penerapan SOP

				yang dipersyaratkan tidak lengkap		
2	PPP Asemdayong	Kelemahan Sistem Organisasi	Pegawai di PPP Asemdayong	Kendali absensi yang perlu dirapikan untuk meningkatkan ketertiban pegawai di PPP Asemdayong berkaitan dengan kehadiran dan jam kerja	Tidak adanya sistem absensi non ASN dengan Fingerprint di PPP Asemdayong	Pengadaan Alat Absensi Fingerprint
3	PPP Asemdayong	Perangkapan Jabatan	Petugas Kebersihan	kurang terjangkaunya kebersihan hingga ke seluruh kawasan di PPP Asemdayong	Kurangngya jumlah petugas kebersihan dan sarana / prasarana kebersihan	Pengadaan Kendaraan Kebersihan Roda 3
4	PPP Asemdayong	Hubungan afiliasi	Kepala PPP, Petugas pelayanan retribusi	Pembayaran kios yang tertunda	hubungan pertemanan dengan pihak tertentu sehingga mempengaruhi keputusan	Penegasan dan pemberian pemahaman tentang mekanisme yang benar dalam perjanjian sewa lahan, Surat Perjanjian Sewa yang sudah disepakati (PKS)
5	PPP Asemdayong	Gratifikasi	KPA, PPTK, Penyedia Barang/Jasa	Pemberian gratifikasi saat pelaksanaan pemilihan penyedia barang jasa	Penyedia mengharapkan menjadi pelaksana barang jasa akan tetapi tidak mau mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku	bertindak secara profesional dengan mengutamakan integritas dan meminta pendampingan dari APIP

1	PPP Tasikagung	Kelemahan sistem organisasi	Kepala PPP, Petugas pelayanan	Retribusi Pas Masuk masih dilakukan secara manual.	Belum menemukan sistem yang sesuai dan dapat diterapkan	Menunjuk pegawai yang berintegritas sebagai penanggung jawab penarikan retribusi pas masuk
2		Gratifikasi	Kepala PPP, Petugas pelayanan	Kepala PPP/Petugas Pelayanan menerima gratifikasi dari penerima layanan	Penerima layanan merasa perlu memberikan sesuatu sebagai ucapan terima kasih atas layanan yang diberikan	Memasang banner, spanduk "Stop Gratifikasi", tidak pernah meminta imbalan dalam bentuk apapun dari penerima layanan
3		Hubungan afiliasi	KPA, PPTK	KPA dan PPTK memilih penyedia barang/jasa yang sudah dikenal	KPA dan PPTK merasa bahwa jika penyedia barang/jasa dari orang yang dikenal, maka kegiatan penyediaan akan terlaksana dengan baik, barang/jasa yang tersedia sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan	Proses pengadaan barang/jasa melalui prosedur yang telah ditentukan
4		Kepentingan Pribadi	Kepala dan seluruh staf	Kepala dan staf menyewa tempat usaha di kawasan pelabuhan	Peluang usaha di kawasan pelabuhan sangat terbuka luas, dan akan lebih mudah mencari konsumen	Kepala dan seluruh staf PPP tidak diperkenankan menyewa lahan maupun kios di kawasan pelabuhan
1	PPP Tawang	Hubungan Afiliasi	Petugas Kebersihan, Petugas TPI	Penanganan sampah di TPI	Sampah ikan tidak ditangani dengan baik sehingga menimbulkan bau tidak sedap	Dilakukan pembersihan oleh petugas sampah internal PPP Tawang

2	PPP Tawang	Hubungan Afiliasi	Petugas Retribusi Pas Masuk, Petugas Parkir (Masyarakat)	Pengunjung yang masuk harus membayar pas masuk dari PPP Tawang dan parkir dari petugas (masyarakat)	Petugas parkir sudah sejak awal berdirinya PPP sehingga akan terus melakukan penarikan parkir	Mengundang inspektorat untuk memfasilitasi pertemuan antara PPP Tawang DKP Jateng dengan petugas parkir
3	PPP Tawang	Hubungan Afiliasi	Kepala PPP Tawang, Stakeholder Desa	Menggunakan area PPP sebagai akses keluar masuk desa	Terdapat desa yang bersebelahan dengan PPP Tawang dengan pembatas sungai sehingga akses keluar masuk desa melalui lahan PPP Tawang	Koordinasi dengan pusdataru kendal untuk pembangunan jembatan, serta koordinasi dengan pengelola kapal penyebarangan untuk memindah lokasi naik turun penumpang
4	PPP Tawang	Hubungan Afiliasi	Kepala PPP Tawang, Petugas Penata Kawasan, TNI AL, TPI, SPBN	Penataan kawasan menjadi tanggung jawab PPP Tawang	Stakeholder menganggap bahwa karena berada di wilayah PPP Tawang, maka semua masalah yang muncul harus diselesaikan oleh PPP Tawang	Koordinasi stakeholder dan kegiatan monev penataan kawasan
1	PPP Larangan	Kelemahan Sistem Organisasi	Kepala PPP Larangan, Pembantu Bendahara Penerimaan Pembantu, Petugas Pemungut Retribusi	Pemungutan retribusi pas masuk kurang optimal karena belum ada portal pas masuk di PPP Larangan	Keterbatasan anggaran untuk membangun portal pas masuk dan pintu gerbang	Pengajuan dan pengadaan portal pas masuk dan pintu gerbang
2	PPP Larangan	Kelemahan Sistem Organisasi	Pegawai Non ASN di PPP Larangan	Jam kedatangan kerja Pegawai Non ASN di PPP Larangan yang tidak sesuai	Belum diberlakukannya sistem absensi dengan Fingerprint untuk Non ASN di PPP Larangan	Pengajuan aktivasi Absensi untuk pegawai Non ASN

				dengan aturan jam kehadiran yang sudah ditetapkan		
3	PPP Larangan	Kelemahan Sistem Organisasi	Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Proses pengajuan dan pengesahan SPJ yang membutuhkan waktu lebih lama	Karena posisi Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang tidak berada dalam 1 kantor sehingga menghambat dalam lamanya proses pengajuan dan pengesahan SPJ	Penyesuaian pelaksanaan proses pengajuan dan pengesahan SPJ dengan kesediaan waktu dari Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
4	PPP Larangan	Perangkapan Jabatan	Pegawai ASN dan Non ASN di PPP Larangan	Pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan jabatan dari SDM yang bersangkutan	Kurangnya jumlah pegawai yang sesuai kompetensinya dengan tugas pokok dan fungsi yang ada di PPP Larangan	Pengajuan Penambahan SDM dari PNS maupun PPPK
5	PPP Larangan	Hubungan afiliasi	Kepala PPP Larangan, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Pemilihan penyedia barang/jasa dari orang yang sudah dikenal	Karena merasa jika penyedia barang/jasa dilakukan oleh orang yang dikenal, maka kegiatan penyediaan akan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan dan hasilnya bagus secara mutu dan kualitas	Proses pemilihan pengadaan langsung sesuai kompetensi, komitmen dan kemampuan dari penyedia

6	PPP Larangan	Hubungan Afiliasi	Kepala PPP Larangan, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu	Barang/jasa yang diterima tidak sesuai spesifikasi pengusulan	Ketersediaan barang / jasa di penyedia belum tersedia atau harus inden	Spesifikasi barang / jasa harus dilakukan secara profesional sesuai prosedur dan diverifikasi oleh pengguna barang / jasa serta dipastikan ketersediaan barang / jasa yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan
7	PPP Larangan	Gratifikasi	Kepala PPP Larangan, Petugas Pelayanan	Kepala PPP Larangan/Petugas Pelayanan menerima gratifikasi dari pengguna jasa pelabuhan	Pengguna jasa pelabuhan merasa hutang budi sehingga memberikan sesuatu sebagai ucapan terima kasih atas layanan yang diberikan	Meningkatkan integritas pegawai dengan tidak pernah meminta dan mengharapkan apapun dalam bentuk imbalan baik itu uang, barang atau jasa dari pengguna jasa
1	PPP Tegalsari	Kelemahan sistem organisasi	Kepala PPP, Petugas pelayanan	Retribusi Pas Masuk masih dilakukan secara manual.	Belum menemukan sistem yang sesuai dan dapat diterapkan	Menunjuk pegawai yang berintegritas sebagai penanggung jawab penarikan retribusi pas masuk
2		Gratifikasi	Kepala PPP, Petugas pelayanan	Kepala PPP/Petugas Pelayanan menerima gratifikasi dari penerima layanan	Penerima layanan merasa perlu memberikan sesuatu sebagai ucapan terima kasih atas layanan yang diberikan	Memasang banner, spanduk "Stop Gratifikasi", tidak pernah meminta imbalan dalam bentuk apapun dari penerima layanan
3		Hubungan afiliasi	KPA, PPTK	KPA dan PPTK memilih penyedia barang/jasa yang sudah dikenal	KPA dan PPTK merasa bahwa jika penyedia barang/jasa dari orang yang dikenal, maka kegiatan penyediaan akan terlaksana dengan baik,	Proses pengadaan barang/jasa melalui prosedur yang telah ditentukan

					barang/jasa yang tersedia sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan	
4		Keterbatasan kesediaan lahan untuk usaha	Kepala dan seluruh staf	Kepala PPP/Petugas Tata Kelola dan Pelayanan Usaha menerima gratifikasi dari penyewa lahan	Pelaku usaha bersedia membayar sewa untuk mendapatkan lahan di kawasan PPP Tegalsari	Dalam balik nama sesuai dengan SOP dan Penyewa lahan harus lebih cermat dalam transaksi balik nama
1	PPP Klidang Lor	Hubungan afiliasi	Kepala PPP Klidang Lor dengan Penyewa Lahan	penyewa keberatan membayar sewa 1 tahun sekaligus	pendapatan usaha menurun	pembayaran di bagi 2 kali atau persemester
2	PPP Klidang Lor	Hubungan afiliasi	Kuasa Pengguna Anggaran dengan Pihak Penyedia	barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang diusulkan	1. aplikasi E-katalog dan gratis ongkir belum komplit; 2. harga di aplikasi lebih mahal dibanding dengan toko	1. Proses pemilihan penyedia barang/jasa secara profesional sesuai prosedur yang telah ditentukan; 2. beli langsung ditoko
1.	PPP Lohgending	Kepentingan Pribadi	Kepala PPP, Petugas pelayanan retribusi	Pemberian alokasi sewa lahan/bangunan kepada pihak tertentu tanpa prosedur (SOP) yang benar dan sesuai	hubungan personal/keluarga dengan pihak tertentu sehingga mempengaruhi keputusan	Memberikan penjelasan/sosialisasi terkait alur dan mekanisme perjanjian sewa lahan dan atau bangunan, Evaluasi dan pengendalian internal yang berjenjang

2.	PPP Lohgending	Hubungan afiliasi	Kepala PPP, Petugas pelayanan retribusi	Pembayaran kios yang tertunda	hubungan personal/keluarga dengan pihak tertentu sehingga mempengaruhi keputusan	Penjelasan kepada penyewa terkait mekanisme yang benar dalam perjanjian sewa lahan dan isi dari Surat Perjanjian Sewa yang sudah disepakati
3.	PPP Lohgending	Gratifikasi	Kepala PPP, Petugas pelayanan retribusi	Pemberian gratifikasi saat pembayaran retribusi sewa lahan / bangunan	penerima layanan merasa harus berterima kasih karena telah dibantu	Tidak meminta imbalan kepada para penyewa lahan/bangunan, seluruh pelayanan pembayaran retribusi dilaksanakan di ruang pelayanan kantor pelabuhan
4.	PPP Lohgending	Gratifikasi	Kepala PPP, Petugas pelayanan perijinan berusaha	Penerimaan gratifikasi dalam pelayanan dokumen perijinan berusaha kapal perikanan	penerima layanan merasa harus berterima kasih karena telah dibantu	Tidak meminta imbalan kepada penerima layanan, Evaluasi dan pengendalian internal yang berjenjang
5.	PPP Lohgending	Hubungan Afiliasi	KPA, PPTK, Penyedia Barang/Jasa	Pemilihan penyedia barang/jasa tidak sesuai spesifikasi	Adanya hubungan pertemanan	Proses pemilihan penyedia barang/jasa secara profesional sesuai prosedur yang telah ditentukan
6.	PPP Lohgending	Gratifikasi	KPA, PPTK, Penyedia Barang/Jasa	Pemberian gratifikasi saat pelaksanaan pemilihan penyedia barang jasa	Penyedia mengharapkan menjadi pelaksana barang jasa akan tetapi tidak mau mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku	bertindak secara profesional dengan mengutamakan integritas

1	PPP Bajomulyo	Gratifikasi	Petugas Pelayanan Kepelabuhanan, Syahbandar Pelabuhan Perikanan, Sub Koor Tata Kelola dan Pelayanan Usaha, Kepala PPP Bajomulyo	Adanya upaya pemberian gratifikasi kepada petugas pelayanan dan pejabat terkait pada saat proses penerbitan SPB, Rekomendasi BBM subsidi, dan Surat Keterangan Operasional BBM Industri	Adanya manipulasi data oleh pihak pemohon (biro jasa) dan kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan lainnya	Penerapan SOP, Sosialisasi kepada pelaku usaha, pembinaan terhadap seluruh pegawai, serta koordinasi dengan instansi terkait (BPH Migas dan DJPT KKP)
1	PPP Karimun Jawa	Gratifikasi	Petugas pelayanan dan pengguna jasa layanan	pelaku usaha ingin perizinan dokumen berlayar yang diajukan lebih cepat diterbitkan meski tidak sesuai SOP dan dokumen persyaratan kurang	Hubungan pertemanan dan keakraban petugas dengan pengguna jasa	Seluruh proses pengajuan dan verifikasi dokumen secara online, penerapan kedisiplinan dan SOP secara tegas
2	PPP Karimun Jawa	Kepentingan Pribadi	Petugas pelayanan dan penyewa lahan	Penyewa memberikan alokasi sewa lahan kepada orang lain secara ilegal / tanpa melalui prosedur yang sah	Perilaku yang tamak / rakus serta etika moral yang lemah	Pembinaan dan pemahaman tentang mekanisme yang benar dalam perjanjian sewa lahan

3	PPP Karimun Jawa	Kelemahan Sistem Organisasi	Petugas pemungut retribusi	Proses pemungutan retribusi pas masuk dan tambat labuh kurang optimal	Keakraban petugas dan pengguna jasa , kondisi fasilitas kolam yang kurang layak sehingga pengguna jasa enggan membayar retribusi tambat labuh	Penerapan SOP, Integritas, Pelaporan secara Rutin
4	PPP Karimun Jawa	Kelemahan Sistem Organisasi	Pegawai di PPP Karimun Jawa	Kendali absensi yang perlu dirapihkan untuk meningkatkan ketertiban pegawai di PPP Karimun Jawa berkaitan dengan kehadiran dan jam kerja	Tidak adanya sistem absensi dengan Fingerprint di PPP Karimun Jawa	Pengadaan Alat Absensi Fingerprint, Pembinaan karyawan
1	PPP Wonokerto	Hubungan Afiliasi	KPA, PPTK, Penyedia Barang/Jasa	Pemilihan penyedia barang/jasa tidak sesuai spesifikasi	Adanya hubungan pertemanan	Proses pemilihan penyedia barang/jasa secara profesional sesuai prosedur yang telah ditentukan
2	PPP Wonokerto	Gratifikasi	Kepala PPP, Petugas pelayanan	Penerimaan gratifikasi dalam pelayanan dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB)	Perilaku individu atau personil yang tamak / rakus serta moral yang lemah, penerima layanan merasa harus berterima kasih	Tidak meminta imbalan kepada penerima layanan, Evaluasi dan pengendalian internal yang berjenjang
3	PPP Wonokerto	Akses khusus kepada pihak tertentu	Kepala PPP, Petugas pelayanan retribusi	Memberikan alokasi sewa lahan/kios kepada orang tertentu tanpa mekanisme yang benar	hubungan pertemanan dengan pihak tertentu sehingga mempengaruhi keputusan	Pemberian pemahaman tentang mekanisme yang benar dalam perjanjian sewa lahan, Evaluasi dan pengendalian internal yang berjenjang

4	PPP Wonokerto	Gratifikasi	KPA, PPTK, Penyedia Barang/Jasa	Pemberian gratifikasi saat pelaksanaan pemilihan penyedia barang jasa	Penyedia mengharapkan menjadi pelaksana barang jasa akan tetapi tidak mau mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku	bertindak secara profesional dengan mengutamakan integritas dan meminta pendampingan dari APIP
5	PPP Wonokerto	Hubungan afiliasi	Kepala PPP, Petugas pelayanan	Pembuatan surat rekomendasi BBM	hubungan pertemanan dengan pihak tertentu sehingga mempengaruhi keputusan	Pembuatan surat rekomendasi BBM dilakukan sesuai dengan SOP, serta dilakukan verifikasi berkas permohonan rekom
6	PPP Wonokerto	Hubungan afiliasi	Kepala PPP, Petugas pelayanan retribusi	Pembayaran kios yang tertunda	hubungan pertemanan dengan pihak tertentu sehingga mempengaruhi keputusan	Pemberian pemahaman tentang mekanisme yang benar dalam perjanjian sewa lahan, Surat Perjanjian Sewa yang sudah disepakati (PKS)
1	Subbag Keuangan	Gratifikasi	Verifikator Keuangan	Verifikator menerima imbalan dari pihak yang diperiksa sehingga memengaruhi keputusan verifikasi	kurangnya pemahaman tentang etika dan tanggung jawab dalam profesi	menerapkan kebijakan tegas terhadap gratifikasi di semua level organisasi
2	Subbag Keuangan	Hubungan Afiliasi	Penyusun Laporan Keuangan	Penyusun Laporan Keuangan memodifikasi laporan keuangan untuk menutupi kesalahan atau kekurangan yang bisa merugikan pihak tertentu yang	lemahnya sistem pengendalian internal organisasi	meningkatkan sistem pengendalian internal organisasi

				memiliki hubungan pribadi		
3	Subbag Keuangan	Kelemahan Sistem Organisasi	Bendahara Gaji	Tunjangan anak tetap diberikan pada anak usia lebih dari 21 tahun	pegawai yang bersangkutan tidak menyampaikan perubahan data kepegawaian ke subbagian umum dan kepegawaian dan subbagian keuangan	meningkatkan koordinasi antara subbagian umum dan kepegawaian dengan sub bagian keuangan

